

G30S/PKI 1 Oktober 1965: Fakta Sejarah dan Kontroversi Keterlibatan Soeharto

**Faris Putranov^{1*}, Aditya Puri Ilham¹, Muhamad Zid¹, Wini Mustikarani¹
Hikari Dwi Saputro¹**

¹Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

*Alamat email penulis koresponden: farisputranov@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas fakta sejarah dan kontroversi terkait peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965, dengan fokus pada dugaan keterlibatan Soeharto. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan, menelaah dokumen resmi, arsip, literatur ilmiah, dan kesaksian para pelaku untuk memahami kronologi, dinamika politik, serta peran tokoh kunci. Hasil kajian menunjukkan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan operasi G30S/PKI, posisi strategis Soeharto yang tidak menjadi sasaran, kedekatan dengan beberapa pelaku, dan dugaan pengaturan pasukan tertentu, yang memunculkan pertanyaan kritis mengenai keterlibatannya. Penelitian ini menekankan pentingnya rekonstruksi sejarah berbasis fakta dan analisis ilmiah untuk memperoleh pemahaman objektif, menghindari bias narasi resmi, serta menumbuhkan kesadaran historis bagi generasi muda

Kata kunci = G30S/PKI, 1 Oktober, Sejarah, Soeharto, Kontroversi

Abstract

This study discusses the historical facts and controversies surrounding the events of September 30, 1965 (G30S/PKI), with a focus on Suharto's alleged involvement. This study uses a qualitative approach through a literature review, examining official documents, archives, scientific literature, and participant testimonies to understand the chronology, political dynamics, and roles of key figures. The results of the study show irregularities in the implementation of the G30S/PKI operation, Suharto's strategic position as a non-target, his closeness to several perpetrators, and allegations of the deployment of certain troops, which raise critical questions about his involvement. This research emphasizes the importance of fact-based historical reconstruction and scientific analysis to obtain an objective understanding, to avoid bias in the official narrative, and to foster historical awareness among younger generations.

Keywords = G30S/PKI, October 1, History, Suharto, Controversy

1. PENDAHULUAN

Ilmu sejarah memiliki peranan penting dalam memahami perjalanan suatu bangsa. Melalui sejarah, manusia dapat menelusuri akar dari berbagai peristiwa yang membentuk arah politik, sosial, ekonomi, dan budaya negara. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu yang dihafalkan, melainkan hasil kajian ilmiah terhadap fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Fakta sejarah menjadi pilar utama dalam penelitian sejarah, karena tanpa adanya fakta yang teruji, sejarah hanya akan menjadi narasi subjektif tanpa dasar kebenaran (Madjid & Wahyudhi, 2014). Dengan mengkaji fakta secara kritis dan metodologis, sejarawan berupaya menyingkap kebenaran di balik peristiwa yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Dalam konteks Indonesia, banyak peristiwa penting yang membentuk identitas nasional, salah satunya adalah Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia karena menimbulkan dampak luas dalam kehidupan berbangsa. G30S/PKI tidak hanya menyebabkan tewasnya enam jenderal TNI Angkatan

Darat dan satu perwira, tetapi juga memicu perubahan besar dalam struktur kekuasaan nasional (Crouch, 1978). Peristiwa tersebut menandai berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno dan menjadi awal dari lahirnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Kajian ilmiah terhadap G30S/PKI menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak dapat dipahami hanya sebagai tragedi kekerasan semata, melainkan sebagai momentum yang menandai perubahan sosial dan politik besar dalam sejarah Indonesia. Melalui analisis terhadap fakta-fakta sejarah seperti dokumen militer, arsip pemerintahan, kesaksian pelaku, dan catatan media, sejarawan berusaha menelusuri latar belakang serta dampaknya secara objektif. Fakta sejarah berfungsi sebagai dasar untuk menghindari penafsiran yang bias atau manipulatif yang sering muncul akibat kepentingan politik tertentu (McVey & Anderson, 1971).

Selain itu, pembelajaran mengenai fakta sejarah memiliki arti penting bagi dunia pendidikan. Mahasiswa dan masyarakat perlu memahami bahwa sejarah bukanlah sekadar hafalan peristiwa, melainkan hasil interpretasi ilmiah yang didasarkan pada sumber dan bukti konkret. Dengan memahami metode verifikasi fakta, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta menilai kebenaran informasi secara objektif (Gottschalk, 1986). Dalam konteks modern, kemampuan ini menjadi sangat penting di tengah maraknya disinformasi yang dapat menyesatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah bangsanya.

Oleh karena itu, kajian terhadap peristiwa G30S/PKI melalui pendekatan fakta sejarah perlu terus dikembangkan. Selain memperkaya wawasan tentang perjalanan bangsa, kajian ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap peristiwa memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan politik, sosial, dan budaya Indonesia. Pemahaman sejarah yang berbasis pada fakta dan analisis ilmiah akan membantu generasi muda melihat masa lalu secara objektif, memahami masa kini secara kritis, dan menata masa depan dengan lebih bijaksana

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kepustakaan, karena penelitian ini berfokus pada kajian filosofis mengenai fakta sejarah dalam studi kasus tertentu (Timmer, 1966; Gottschalk, 2008). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dokumen, naskah, dan literatur yang relevan, sehingga memungkinkan analisis yang bersifat deskriptif dan kritis terhadap fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Metode Studi Kepustakaan memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah sumber-sumber tertulis yang tersedia, baik berupa dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun penelitian terdahulu, yang secara keseluruhan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peristiwa sejarah yang menjadi fokus penelitian (Walsh, 1960; Moh. Ali, 1966).

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi, arsip sejarah, catatan kronik, dan naskah yang menjadi bukti langsung suatu peristiwa sejarah, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel, dan karya penelitian terdahulu yang menafsirkan fakta sejarah (Sunyoto, 2011; 2013). Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan otoritas, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Gottschalk, 2008).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan dan penelaahan dokumen, karya ilmiah, dan publikasi yang relevan, sementara dokumentasi dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyeleksi informasi penting dari dokumen atau literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis, yaitu menelaah,

menginterpretasikan, dan mengolah informasi untuk menemukan pola, hubungan, dan penyelesaian terhadap studi kasus (Timmer, 1966; Walsh, 1960). Dengan metode ini, fakta sejarah tidak hanya dikumpulkan, tetapi dianalisis secara sistematis untuk membangun narasi sejarah yang kredibel, logis, dan memberikan pemahaman mendalam mengenai peristiwa masa lalu yang menjadi objek penelitian (Sunyoto, 2011; 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta sejarah merupakan dasar utama dalam kajian ilmu sejarah karena memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai peristiwa masa lampau. Kata *fakta* berasal dari bahasa Latin *factus* (selesai) dan *facere* (mengerjakan), yang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Menurut F.J. Tigger, fakta sejarah merupakan hasil penyelidikan kritis dari berbagai sumber dokumenter, sedangkan Moh. Ali menyebut sumber sejarah sebagai segala sesuatu, baik yang berwujud maupun tidak, yang berguna untuk meneliti masa lalu. Louis Gottschalk menambahkan bahwa fakta sejarah harus diambil dari sumber yang kredibel dan telah diuji melalui metode sejarah.

W.H. Walsh menekankan bahwa fakta sejarah tidak sekadar berasal dari peninggalan masa lalu, tetapi juga hasil dari proses berpikir ilmiah melalui teori koherensi, di mana kebenaran diuji secara rasional dan metodologis. Fakta sejarah dianggap sah apabila telah melewati proses verifikasi ilmiah dan memiliki dasar autentik yang tidak diragukan. Oleh karena itu, kualitas sejarah bergantung pada keaslian dan otoritas sumber yang digunakan, serta ketelitian sejarawan dalam melakukan kritik sumber untuk menilai keabsahan data.

Fakta sejarah merupakan inti dari struktur narasi sejarah. Fakta yang disusun secara kronologis akan membentuk pemahaman yang runtut dan saling berkaitan antarperistiwa. Namun, fakta tidak dapat dipilih secara sembarangan; harus melalui tahap seleksi dan pembuktian yang ketat agar kebenarannya terjamin.

Fakta sejarah kemudian dibedakan menjadi empat jenis utama:

1. Fakta Lunak (Soft Facts) – fakta yang masih perlu dibuktikan dan sering menjadi bahan perdebatan. Contohnya, keberadaan *Supersemar* yang hingga kini belum ditemukan naskah aslinya. Fakta lunak penting sebagai dasar penelitian lanjutan.
2. Fakta Keras (Hard Facts) – fakta yang telah diterima secara umum dan tidak lagi diperdebatkan, seperti peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 yang didukung oleh dokumen dan rekaman autentik.
3. Inferensi (Inference) – berupa benang merah atau hubungan logis antar fakta. Inferensi berfungsi menjelaskan bagian sejarah yang hilang atau tidak lengkap, misalnya dalam upaya memahami strategi perang Pangeran Diponegoro.
4. Opini (Opinion) – pandangan atau penilaian pribadi sejarawan terhadap peristiwa sejarah. Meski bersifat subjektif, opini penting dalam memperkaya interpretasi sejarah asalkan didukung argumen logis dan bukti yang relevan.

Setelah memahami konsep dasar mengenai fakta sejarah yang mencakup fakta keras, fakta lunak, inferensi, dan opini, penting untuk menerapkan kerangka ini dalam menganalisis peristiwa konkret. Salah satu kasus sejarah Indonesia yang sarat perdebatan dan sering mengalami distorsi adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Melalui pendekatan faktual dan metodologis, peristiwa ini dapat dikaji secara lebih objektif tanpa terjebak pada narasi politik tertentu. Dengan demikian, konsep fakta sejarah berfungsi bukan

hanya sebagai teori, tetapi sebagai alat untuk memilah antara peristiwa yang benar-benar terjadi, peristiwa yang masih perlu diverifikasi, dan penafsiran yang bersifat subjektif.

Kesemrawutan Fakta dan Operasi G30S pada 1 Oktober berdasarkan buku Sutrisno, S. (2003). *Kontroversi dan rekonstruksi sejarah*. Indonesia: Media Pressindo. Gerakan 30 September (G-30-S) pertama kali menyatakan keberadaannya kepada publik pada pagi hari 1 Oktober 1965, sekitar pukul 7.15 pagi, melalui siaran RRI pusat yang telah mereka duduki. Pihak G-30-S sengaja menulis dan menyiarkan pernyataan mereka dalam gaya orang ketiga, seolah-olah pernyataan itu adalah warta berita biasa yang mengutip Letkol Untung, Komandan G-30-S. Pendekatan ini menciptakan "suasana berita yang menenteramkan" dan merupakan awal dari "serangkaian panjang ketidaksesuaian antara apa yang tampak dan apa yang nyata."

Tujuan yang diumumkan adalah untuk mencegah "kup kontra-revolusioner" oleh Dewan Jenderal yang diduga berencana mengadakan pameran kekuatan pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober. G-30-S mengklaim bertindak atas kesetiaan kepada Presiden Sukarno, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Mereka mengumumkan telah menahan sejumlah jenderal dan berencana membentuk Dewan Revolusi Indonesia sebagai kekuasaan eksekutif, menuntut kesetiaan dari semua partai dan organisasi.

Di lapangan, pasukan G-30-S, yang utamanya berasal dari Batalyon 454 dan Batalyon 530 Angkatan Darat, menduduki Lapangan Merdeka (termasuk stasiun RRI di sisi barat) dan gedung telekomunikasi di sisi selatan, serta memutus jaringan telepon di Jakarta. Secara tersembunyi, operasi penculikan diluncurkan dari Lubang Buaya, daerah kebun karet di selatan kota. Tujuh kelompok penculik bergerak sekitar pukul 3.15 pagi untuk menangkap tujuh jenderal. Meskipun Jenderal A.H. Nasution berhasil melarikan diri, enam jenderal lainnya (Yani, Parman, Harjono, Suprpto, Pandjaitan, dan Soetojo) serta seorang letnan (Pierre Tendean, ajudan Nasution yang salah tangkap) berhasil diculik. Keenam jenderal dan letnan tersebut kemudian dibunuh di Lubang Buaya, kemungkinan sekitar pukul 10.00 pagi, dan jasad mereka dibuang ke dalam sumur mati.

Keganjilan dalam Pelaksanaan dan Komposisi Pimpinan

Terdapat keganjilan besar terkait Presiden Sukarno. Letkol Untung sebagai Komandan pasukan kawal presiden seharusnya tahu lokasi Presiden, namun G-30-S gagal menempatkan Sukarno "di bawah perlindungannya." Ketika tiga perwira mereka (termasuk Brigjen Supardjo) pergi ke Istana, Presiden tidak ada di sana. Sukarno, yang dibawa ke rumah istrinya dan menghindari Istana karena adanya pasukan tak dikenal di Lapangan Merdeka, akhirnya pergi ke Pangkalan AURI Halim atas inisiatifnya sendiri. Ini menunjukkan G-30-S bekerja dengan tujuan yang saling berselisih (pasukan yang seharusnya melindungi Presiden justru membuatnya menjauhi Istana).

Pimpinan inti G-30-S terdiri dari lima orang: tiga perwira militer (Untung, Latief, Soejono) dan dua orang sipil dari Biro Khusus PKI (Sjam dan Pono). Mereka berkumpul di Halim. Ketua PKI, D.N. Aidit, juga hadir di Halim tetapi tinggal terpisah di rumah lain. Komunikasi antara pimpinan inti, Aidit, dan pasukan mereka di lapangan hanya mengandalkan kurir pribadi (jip) karena tidak adanya peralatan komunikasi radio dua arah dan jaringan telepon telah diputus sendiri oleh G-30-S.

Kekuatan G-30-S sangat kecil—diperkirakan total 2.130 personel militer dan 2.000 anggota sipil PKI/afiliasi—hanya sebagian kecil dari kekuatan militer yang ada di Jakarta (Kodam Jaya saja memiliki sekitar 60.000 prajurit). Selain itu, G-30-S tidak bertindak seperti pasukan

kudeta: mereka tidak mengepung atau menduduki markas komando lawan (Kodam Jaya atau Kostrad), tidak membangun pos pemeriksaan, dan tidak memiliki tank, menunjukkan kurangnya persiapan untuk menghadapi serangan balik.

Dampak dan Kritik terhadap Versi Resmi

G-30-S tumbang dengan cepat—pasukan mereka meninggalkan Lapangan Merdeka hanya setelah dua belas jam. Mayor Jenderal Suharto dengan cepat mengambil alih komando Angkatan Darat dan menggunakan G-30-S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Sukarno dan merebut kekuasaan melalui "kudeta merangkak."

Suharto menuduh PKI sebagai dalang, memicu penangkapan massal (lebih dari satu setengah juta orang) dan pembunuhan massal terhadap ratusan ribu orang yang terkait dengan PKI. Penulis menekankan bahwa versi resmi rezim Suharto tidak meyakinkan dan penuh keraguan. Persidangan militer (Mahmilub) dianggap cacat karena para hakim sudah memiliki kepercayaan bahwa PKI bersalah. Selain itu, klaim propaganda bahwa para jenderal disiksa dan dimutilasi secara keji oleh massa pendukung PKI telah terbukti palsu; Visum et Repertum (laporan dokter) yang disembunyikan menunjukkan para perwira tewas karena luka tembak dan tusukan bayonet. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar narasi resmi Orde Baru adalah rekayasa absurd yang dirancang untuk perang urat syaraf, menjadikannya "dalih pembunuhan massal."

Peristiwa G30S/PKI diawali dengan fakta keras berupa terjadinya penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI AD dan satu perwira pada dini hari 1 Oktober 1965. Fakta ini didukung oleh bukti otentik seperti Visum et Repertum hasil pemeriksaan dokter serta penemuan jasad para korban di Lubang Buaya. Fakta keras lain adalah pengumuman G30S melalui siaran RRI sekitar pukul 07.15 pagi yang secara resmi terdokumentasi.

Namun, di balik fakta keras tersebut terdapat sejumlah fakta lunak yang masih menjadi perdebatan, misalnya siapa aktor utama di balik gerakan tersebut. Versi resmi Orde Baru menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang, tetapi berbagai kesaksian dan temuan dokumen menunjukkan adanya kemungkinan peran lain, termasuk keterlibatan unsur militer tertentu. Fakta lunak ini muncul karena belum adanya bukti primer yang sepenuhnya menegaskan pihak perencana utama.

Sementara itu, inferensi sejarah digunakan untuk menjelaskan hubungan antara fakta yang terpisah. Misalnya, kesaksian Kolonel A. Latief yang mengaku telah memberi tahu Soeharto dua kali sebelum peristiwa terjadi dapat diinterpretasikan sebagai inferensi bahwa Soeharto memiliki pengetahuan awal mengenai gerakan tersebut. Inferensi ini diperkuat dengan fakta keras bahwa Soeharto tidak menjadi sasaran penculikan, padahal posisinya sangat strategis di bawah Jenderal Ahmad Yani. Kombinasi kedua fakta ini membuka ruang analisis bahwa terdapat pola komunikasi atau strategi tersembunyi yang belum terungkap secara penuh.

Adapun opini sejarah muncul dalam interpretasi para sejarawan modern yang menilai Soeharto mungkin menggunakan peristiwa ini sebagai momentum untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Walaupun bersifat subjektif, opini ini sah secara akademik jika didasarkan pada argumentasi logis dan didukung oleh inferensi yang kuat.

Pada buku Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Indonesia: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra. Kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi sejarah G30S/PKI muncul karena semakin banyak masyarakat yang bingung akibat perbedaan antara versi resmi *Buku Putih* Orde Baru dan temuan baru yang beredar lewat media. Informasi baru tersebut bahkan membalik peran Soeharto, dari sosok

pemberantas menjadi pihak yang diduga terlibat atau mengetahui lebih awal tentang peristiwa tersebut.

Beberapa fakta baru yang diungkap antara lain:

1. Pengakuan Kolonel A. Latief — Ia menyatakan telah dua kali memberi tahu Soeharto tentang rencana “penindakan terhadap Dewan Jenderal” dua hari dan enam jam sebelum peristiwa terjadi. Namun Soeharto, kala itu Panglima Kostrad, tidak mengambil langkah apa pun atau melapor kepada atasannya.
2. Soeharto tidak menjadi sasaran G30S/PKI, padahal posisinya sangat strategis di bawah Jenderal A. Yani. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Soeharto memiliki hubungan atau pengetahuan tertentu terkait rencana tersebut.
3. Kedekatan pribadi Soeharto dengan beberapa tokoh pelaku gerakan, seperti Letkol Untung dan Kolonel Latief, serta hubungan lama dengan Sjam, yang pernah bersama Soeharto mengikuti diskusi ideologis di *House of Marx* Yogyakarta bersama Alimin dan Subadio Sastrosatomo.
4. Kesaksian Mayjen (Purn) Mursjid, yang menyatakan bahwa pasukan Yon 530/Brawijaya telah ditempatkan di sekitar Monas malam sebelum peristiwa, dengan penugasan yang disebut-sebut berasal dari Soeharto sendiri. Namun anehnya, area timur yang menghadap ke markas Kostrad justru kosong dari penjagaan.
5. Keterangan Mayjen (Purn) Suharjo dan Mayor (Purn) Soekarbi menguatkan bahwa surat perintah dari Soeharto kepada pimpinan Yon 530 dalam konteks penugasan tersebut kemudian dibeli kembali oleh Soeharto dengan harga Rp 20 juta, seolah untuk menghilangkan jejak dokumenter.

Rangkaian fakta di atas menunjukkan adanya versi alternatif yang mempertanyakan peran Soeharto dalam G30S/PKI. Jika versi resmi Orde Baru menggambarkannya sebagai pahlawan penyelamat bangsa, maka rekonstruksi sejarah ini mencoba meninjau ulang peran tersebut secara kritis, membuka ruang bagi analisis baru tentang keterlibatan tokoh dan dinamika politik pada masa transisi menuju Orde Baru.

Berdasarkan pendekatan kategorisasi fakta sebelumnya, keterlibatan Soeharto dapat dipandang melalui tiga lapisan bukti: Fakta keras: Posisi Soeharto sebagai Panglima Kostrad yang mengambil alih komando pasca-G30S dan menumpas gerakan secara cepat. Fakta lunak: Kesaksian Kolonel Latief dan beberapa perwira yang menyebut Soeharto mengetahui rencana gerakan sebelumnya namun tidak bertindak.

Inferensi: Dugaan bahwa hubungan pribadi Soeharto dengan tokoh pelaku (Letkol Untung, Latief, dan Sjam) menunjukkan ia mungkin memiliki akses informasi yang tidak digunakan untuk mencegah peristiwa. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa analisis keterlibatan Soeharto tidak dapat hanya berdasarkan tuduhan politik, tetapi harus diuji melalui tingkat kekuatan fakta. Fakta keras menunjukkan tindakan Soeharto pascaperistiwa, sementara fakta lunak dan inferensi membuka pertanyaan kritis mengenai pengetahuannya sebelum peristiwa. Dengan cara ini, rekonstruksi sejarah menjadi lebih ilmiah, transparan, dan tidak terjebak pada narasi tunggal Orde Baru.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965 merupakan titik krusial dalam sejarah politik Indonesia yang hingga kini masih menyisakan kontroversi. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, diperoleh pemahaman bahwa fakta

sejarah tidak bersifat tunggal, melainkan tersusun dari berbagai lapisan bukti — mulai dari fakta keras, fakta lunak, inferensi, hingga opini sejarah. Fakta keras seperti penculikan dan pembunuhan para jenderal telah terverifikasi melalui dokumen resmi dan bukti forensik. Namun, fakta lunak dan inferensi membuka ruang analisis lebih dalam terhadap kemungkinan adanya peran atau pengetahuan awal Soeharto sebelum peristiwa berlangsung.

Kesaksian beberapa tokoh militer seperti Kolonel A. Latief serta hubungan pribadi Soeharto dengan sejumlah pelaku utama menimbulkan dugaan bahwa peristiwa ini bukan hanya gerakan spontan PKI, melainkan bagian dari dinamika politik yang kompleks. Meskipun belum ditemukan bukti primer yang menegaskan keterlibatan langsung Soeharto, rekonstruksi sejarah modern mengindikasikan adanya motif politik yang berujung pada peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kajian sejarah harus dilakukan secara kritis, objektif, dan ilmiah agar tidak terjebak pada narasi resmi yang sarat kepentingan politik. Upaya rekonstruksi fakta dan penafsiran berbasis bukti menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran historis generasi muda bahwa sejarah bukan sekadar propaganda, tetapi cermin pencarian kebenaran. Hanya dengan cara demikian, pemahaman terhadap G30S/PKI dapat lebih utuh, berimbang, dan berfungsi sebagai pelajaran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. DR. Kuntowijoyo. (). *Pengantar ilmu sejarah*. : BENTANG PUSTAKA.
- Ali, M. (1966). *Pengantar ilmu sejarah Indonesia*. Jakarta: PT Aksara Baru.
- Crouch, H. (1978). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti sejarah (The Use of History)*. Jakarta: UI Press.
- Madjid, N., & Wahyudhi, A. (2014). *Filsafat ilmu sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- McVey, R. T., & Anderson, B. R. (1971). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project.
- Roosa, J. (2008). *Dalih pembunuhan massal: Gerakan 30 September dan kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia & Hasta Mitra.
- Sunyoto, A. (2011). *Metodologi penelitian sejarah: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sunyoto, A. (2013). *Metodologi penelitian sejarah: Paradigma baru penelitian sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutrisno, S. (2003). *Kontroversi dan rekonstruksi sejarah*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Timmer, F. J. (1966). *The Nature and Function of Historical Facts*. Leiden: Brill.
- Walsh, W. H. (1960). *An Introduction to Philosophy of History*. London: Hutchinson University Library.